

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik dan resolusi konflik lahan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan PT. Primatama Cipta Sarana (PCS) di Pasar Ciwidey. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dan teori konflik Ralf Dahrendorf, penelitian ini menemukan bahwa konflik dipicu oleh ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama relokasi dan pembangunan pasar. PT. PCS dianggap wanprestasi akibat penolakan penyerahan hak pengelolaan lahan, yang berdampak pada stagnasi aktivitas ekonomi dan ketidakpastian hukum bagi para pedagang. Proses resolusi konflik ditempuh melalui jalur litigasi, mediasi, dan negosiasi yang melibatkan komunikasi intensif antara kedua belah pihak, serta fasilitasi oleh pemerintah daerah. Hasil akhir menunjukkan bahwa penyelesaian dicapai melalui kompromi, yaitu pengakhiran perjanjian kerja sama dan pengembalian hak pengelolaan pasar kepada pemerintah daerah. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian tentang konflik lahan, khususnya terkait kompleksitas hubungan antara aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan aset publik.

Kata Kunci: Konflik Lahan, Resolusi Konflik, Pasar Ciwidey

ABSTRACT

This study aims to analyze the land conflict and its resolution between the Bandung Regency Government and PT. Primatama Cipta Sarana (PCS) at the Ciwidey Market. Employing a qualitative case study approach and Ralf Dahrendorf's conflict theory, the research finds that the conflict arose from discrepancies in the implementation of a market relocation and development agreement. PT. PCS was considered to be in breach of contract due to its refusal to transfer land management rights, resulting in stagnation of economic activity and legal uncertainty for traders. Conflict resolution efforts involved litigation, mediation, and negotiation mechanisms, with intensive communication between both parties facilitated by the local government. The final outcome was a compromise in the form of contract termination and the return of market management rights to the local government. This study contributes to the literature on land conflicts, particularly regarding the complexity of relations among government, private actors, and communities in the management of public assets.

Keywords: Land conflict, conflict resolution, breach of contract, Ciwidey Market